



Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tinting Kecamatan Sarolangun

Yanni Rahman^{1*}, Mulia Inda Purwati², Kiki Helencia³

¹²³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Adiwangsa Jambi
Jalan Sersan Muslim, Kota Jambi, Jambi, 36138

*Korespondensi: yanniyr168@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the village financial management of Tinting Village, Sarolangun Subdistrict, in improving community welfare and to identify its supporting and inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. The informants in this study were the village secretary, village treasurer, and the Village Activity Implementation Team (TPKAD). Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the financial management of Tinting Village has been implemented through planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. However, it has not been fully optimal in improving community welfare, as it is still dominated by infrastructure development rather than community economic empowerment programs. The supporting factors include clear regulations, cooperation among village officials, and community participation. Meanwhile, the inhibiting factors consist of limited human resources of village officials, low community understanding, and limited budget for empowerment programs.*

Keywords: *Community Welfare, Village Fund, Village Financial Management*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Tinting Kecamatan Sarolangun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa (TPKAD). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tinting telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur dibandingkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Faktor pendukung pengelolaan keuangan desa meliputi regulasi yang jelas, kerja sama antar perangkat desa, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat

Kata kunci: Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pengelolaan Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan tata kelola pemerintahan di Indonesia pada era desentralisasi menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri (Rahmalia & Mubarak, 2025). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang berperan penting

dalam menentukan arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Firdaus & Prihatin, 2025).

Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap tahapan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat (Lay & Karno, 2025). Perencanaan keuangan desa yang baik harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat serta disusun melalui mekanisme partisipatif agar program yang dirancang sesuai dengan prioritas pembangunan desa (Rais & Rini, 2024).

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa. Kesejahteraan tidak hanya dipahami dari aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat (Widowati et al., 2023). Dana desa yang dikelola secara efektif dapat menjadi sumber pembiayaan utama bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Wibisono et al (2025) menegaskan bahwa desa dengan pengelolaan keuangan yang baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan desa yang pengelolaan keuangannya kurang optimal.

Desa Tinting Kecamatan Sarolangun merupakan salah satu desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam kerangka kebijakan desentralisasi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih menghadapi beberapa tantangan dalam optimalisasi pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan salah satu aparatur Desa Tinting pada tanggal 12 Februari 2026, diketahui bahwa penggunaan dana desa masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan dan sarana prasarana, sementara program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Palupiningtyas (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang efektif mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan serta memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Tinting Kecamatan Sarolangun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2) Untuk faktor pendukung pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tinting Kecamatan Sarolangun, 3) Untuk faktor penghambat pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tinting Kecamatan Sarolangun.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2021) *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, serta menghindari salah alokasi dana dan praktik korupsi. Pandangan ini menegaskan bahwa *good governance* berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya publik secara akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan. Sedarmayanti (2020) mendefinisikan *good governance* sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta supremasi hukum. Definisi ini menekankan pentingnya peran aktor non-pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 *Pengelolaan Keuangan Desa*

Mahmudi (2020) mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari manajemen keuangan sektor publik yang menekankan pada pencapaian tujuan pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa secara efektif dan akuntabel. Dalam pandangan ini, pengelolaan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Halim & Kusufi (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana keuangan desa direncanakan, digunakan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Sistem ini dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat Desa

Badrudin (2020) memaknai kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Dalam perspektif pembangunan desa, kesejahteraan tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tersedianya infrastruktur dasar, serta terbukanya akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Menurut Mardiasmo (2021) kesejahteraan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel memungkinkan alokasi anggaran yang tepat sasaran sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tinting Kecamatan Sarolangun. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi objek penelitian secara alamiah serta menghasilkan data yang bersifat kontekstual dan mendalam (Sugiyono, 2021). Data yang digunakan merupakan data kualitatif berupa informasi deskriptif yang diperoleh melalui sumber data primer. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, meliputi Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran yang dinilai memiliki pengetahuan serta peran strategis dalam pengelolaan keuangan desa (Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi

yang komprehensif, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen pendukung seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, serta dokumen perencanaan pembangunan desa. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan guna memastikan konsistensi dan kebenaran data (Moleong, 2021). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data yang telah diverifikasi sehingga menghasilkan temuan yang valid mengenai pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Keuangan Desa Tinting dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tinting telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, penyusunan program dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, sehingga menghasilkan RKPDes yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan desa (Oktaviana & Nugroho, 2025). Pada tahap pelaksanaan, penggunaan anggaran telah mengacu pada APBDes, namun masih lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum optimal (Subhan & Saputra, 2023)

Pada tahap penatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan telah dilakukan secara tertib melalui pencatatan sistematis oleh bendahara desa dengan dukungan bukti transaksi yang lengkap, serta pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa. Pada tahap pelaporan, laporan keuangan disusun secara berkala dan telah memenuhi ketentuan administratif, meskipun transparansi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, penyusunan laporan

realisasi APBDes beserta dokumen pendukung menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa telah berjalan dengan baik secara administratif (Wibisono et al., 2025).

Menurut Mardiasmo (2021) konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan publik menekankan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomi berkaitan dengan bagaimana sumber daya digunakan secara hemat, efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara input dan output, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penggunaan dana desa di Desa Tinting memang telah mengikuti prosedur administrasi yang baik, namun dari sisi efektivitas, tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai karena dana desa masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fauzan et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti (2020) mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat serta efektivitas pembangunan desa. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin baik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, maka semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tinting telah berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh aspek administrasi, tetapi juga oleh arah kebijakan dalam penggunaan anggaran agar lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.2 Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Faktor pendukung pengelolaan keuangan Desa Tinting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi beberapa aspek utama, yaitu adanya regulasi yang jelas, kerja sama antar perangkat desa, penggunaan sistem keuangan desa, serta partisipasi masyarakat (Rahmalia & Mubarak, 2025). Regulasi yang jelas menjadi landasan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa sehingga pelaksanaannya

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kerja sama yang baik antar perangkat desa turut mendukung kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan (Sinambela et al., 2025).

Di sisi lain, pemanfaatan sistem keuangan desa membantu proses pencatatan dan pengelolaan keuangan agar lebih tertib, sistematis, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga menjadi faktor penting karena memungkinkan adanya penyesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara regulasi yang memadai, sumber daya aparatur desa, dukungan sistem administrasi, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Efendi et al (2024) menunjukkan bahwa faktor pendukung utama pengelolaan keuangan desa adalah kuatnya regulasi, koordinasi antar perangkat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian tersebut menemukan bahwa semakin baik koordinasi dan partisipasi masyarakat, maka semakin efektif pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan. Hasil tersebut sejalan dengan kondisi di Desa Tinting, di mana regulasi, kerja sama perangkat desa, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, faktor pendukung pengelolaan keuangan Desa Tinting meliputi regulasi yang jelas, kerja sama perangkat desa, sistem keuangan desa, dan partisipasi masyarakat. Keempatnya saling berkaitan dalam mendukung kelancaran pengelolaan, mulai dari kepastian aturan, kelancaran administrasi dan pelaksanaan, ketertiban pencatatan, hingga kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

4.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa Tinting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan, menjadi kendala yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap

program desa juga berdampak pada kurangnya dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (Firdaus & Prihatin, 2025).

Keterbatasan anggaran menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kendala teknis di lapangan, seperti kondisi geografis dan hambatan operasional lainnya, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan (Prabowo & Palupiningtyas, 2024). Dengan demikian, kombinasi antara keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kendala teknis menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rais & Rini, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Al-amin (2025) menunjukkan bahwa faktor penghambat pengelolaan keuangan desa meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat terhadap anggaran desa, serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan kondisi di Desa Tinting, di mana faktor SDM, pemahaman masyarakat, dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.

. Dengan demikian, faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa Tinting terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan anggaran, keterlambatan pencairan dana, dan kendala teknis pelaksanaan kegiatan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak terhadap belum optimalnya pengelolaan keuangan desa, terutama dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tinting Kecamatan Sarolangun telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan desa meliputi adanya regulasi yang jelas, kerja sama yang baik antar perangkat desa, serta partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa perlu diarahkan pada penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dampaknya lebih signifikan terhadap kesejahteraan. Selain itu, pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan serta penguatan transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mendorong partisipasi publik dan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Badrudin. (2020). *Dasar-dasar manajemen keuangan publik*. UPP STIM YKPN.
- Efendi, N., Setiawan, A. B., & Melani, M. M. (2024). Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pustala Aktiva*, 4(1), 30–38.
- Fauzan, Saebani, B. A., & Tresnayadi, B. (2025). Village fund management under Law No.3/2024 and its impact on community welfare in Ciawi District from a siyasah maliyah perspective. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 5(3), 299–312.
- Firdaus, & Prihatin, P. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Studi Kasus Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan (JMP)*, 2(4), 504–510.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Salemba Empat.
- Kuswanti. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Lay, M. J. C. R., & Karno. (2025). Transparency and Accountability in Village Financial Management to Improve Community Welfare: An Analysis of Village Development Trends in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOURMI)*, 3(2), 1–5.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen keuangan sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja

Rosda Karya.

- Oktaviana, Y., & Nugroho, P. I. (2025). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *JEKP: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 12(1), 44–56.
- Prabowo, A. G., & Palupiningtyas, D. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 73–81.
- Rahmalia, R., & Mubarak, A. (2025). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Administrasi Pemerintah Desa*, 06(02), 1–8.
- Rais, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Program Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAMAS)*, 2(3), 689–694.
- Sedarmayanti. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Simanjuntak, J. P., & Ivanna, J. (2025). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 17733–17739.
- Subhan, A., & Saputra, I. A. (2023). Peningkatan Tata Kelola Fiskal Perdesaan melalui Transparansi Keuangan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 5(3), 11–20.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, CV.
- Wibisono, N., Asnawi, N., Ekowati, V. M., Economics, S., Program, D., Departement, A., Timur, J., & Departement, M. (2025). Improving Village Government Performance through Village Financial Management, Good Village Governance, and Knowledge Management. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 164–178. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p164-177>
- Widowati, S. A., Utami, W. B., & Samanto, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 430–442.
- Wulandari, & Al-amin. (2025). Transparansi pengelolaan dana desa: evaluasi kebijakan dan implementasi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 208–218.